



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI  
DENGAN PIMPINAN KOMISI DAN PIMPINAN PANSUS DPR RI DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016 DAN USULAN  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2017**

**TANGGAL 24 OKTOBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 19 (sembilan belas )
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Senin, 24 Oktober 2016.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Ketua Rapat	: Widiharto, SH., MH.
Sekretaris	: - 36 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.
Hadir	- Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI; - Pimpinan Pansus

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka pembahasan Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada pimpinan komisi dan pimpinan Pansus untuk menyampaikan pandangan/usulannya.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Pimpinan Komisi-Komisi menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai berikut :

#### 1. Pimpinan Komisi I

- Komisi I dalam melaksanakan tugas legislasinya sedang melakukan pembahasan dan penyusunan terhadap beberapa RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, diantaranya adalah : RUU tentang Penyiaran.
- Terkait dengan pembahasan RUU tentang Penyiaran tersebut, Komisi I berharap kiranya waktu pelaksanaan pembahasan dapat ditambah/diperpanjang, mengingat RUU ini sangat strategis dalam bidang keamanan negara.
- Terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Komisi I mengusulkan :
  - 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - 2) RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI);
  - 3) RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi.

#### 2. Pimpinan Komisi II:

- Komisi II saat ini sedang melakukan pembahasan RUU tentang Pertanahan yang dalam proses pembahasan DIM.
- Untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Komisi II mengusulkan:
  - 1) RUU tentang Pemilu;
  - 2) RUU tentang Pertanahan; dan
  - 3) RUU tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### 3. Pimpinan Komisi III (tidak hadir):

#### 4. Pimpinan Komisi IV:

- Komisi IV saat ini masih melakukan pembahasan atas RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dari Komisi IV adalah:
  - 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  - 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### 5. Pimpinan Komisi V (tidak hadir).

Berdasarkan surat yang dikirimkan ke Sekretariat Badan Legislasi Nomor 103/KOM.V/DPR RI/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 yang diusulkan oleh Komisi V adalah :

- 1) RUU tentang Arsitek;
- 2) RUU tentang Sumber Daya Air.

#### 6. Pimpinan Komisi VI:

- Komisi VI saat ini sedang melakukan pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan beberapa RUU yang berasal dari RUU Kumulatif Terbuka salah satunya adalah RUU tentang Perkoperasian.
- Komisi VI juga telah menyelesaikan penyusunan atas RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang saat ini dalam proses pengharmonisasian, pbulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi.
- Untuk pembahasan RUU tentang Perkoperasian dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dijadwalkan akan diselesaikan pembahasannya pada tahun 2017.

- Adapun usulan untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dari Komisi VI merupakan RUU luncuran dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dengan menambahkan RUU tentang BUMN.
7. Pimpinan Komisi VII:
- Komisi VII saat ini sedang melakukan penyusunan atas draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba).
  - Kedua RUU tersebut (RUU Migas dan RUU Minerba) dalam proses finalisasi untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi.
  - Untuk usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Komisi VII meminta agar kedua RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan menambahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.
8. Pimpinan Komisi VIII:
- Komisi VIII telah menyelesaikan 2 (dua) RUU yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, yaitu RUU tentang Penyandang Disabilitas dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
  - Komisi VIII saat ini masih melakukan pembahasan atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan penyusunan atas RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
  - Untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Komisi VIII mengusulkan :
    - 1) RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
    - 2) RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
    - 3) RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.
9. Pimpinan Komisi IX :
- Komisi IX saat ini sedang melakukan pembahasan atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) bersama-sama dengan Pemerintah.
  - Komisi IX juga sedang melakukan penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU tentang Kebidanan sesuai dengan tanggung jawab dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan dijadwalkan akan disampaikan ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi pada Masa Persidangan II Tahun 2016-2017.
  - Usulan untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, Komisi IX mengusulkan :
    - 1) RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN);
    - 2) RUU tentang Kebidanan;
    - 3) RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
    - 4) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia;
    - 5) RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

#### 10. Pimpinan Komisi X:

- Komisi X bertugas untuk melakukan Pembahasan atas RUU tentang Sistem Perbukuan, RUU tentang Kebudayaan, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah.
- Dalam pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah memberikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 586 DIM dan terdapat 5 (lima) masalah utama yang harus mendapat kesepakatan, yaitu:
  - 1) Definisi Buku;
  - 2) Insan Perbukuan;
  - 3) Dewan Perbukuan;
  - 4) Kertas Khusus; dan
  - 5) Pengawasan.
- Dalam Pembahasan RUU tentang Kebudayaan, terdapat perbedaan substansi pokok antara draft DPR RI dan DIM Pemerintah. Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, disepakati untuk sementara menerima sistematika usulan Pemerintah dan segera menyusun butir-butir penting dari masing-masing bab sistematika.
- Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dari Komisi X adalah :
  - 1) RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  - 2) RUU tentang Ekonomi Kreatif;

#### 11. Pimpinan Komisi XI

- RUU yang telah diselesaikan dan telah ditetapkan menjadi UU, yaitu UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- RUU dalam Proses Pembahasan yang dilakukan oleh Komisi XI adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) dan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- RUU dalam proses penyusunan naskah akademis dan draft RUU adalah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Komisi XI mengharapkan agar 5 (lima) RUU yang disebutkan dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai RUU luncuran dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

#### 12. Pimpinan Pansus RUU tentang Merek menyampaikan laporannya sebagai berikut :

- DIM RUU tentang Merek berasal dari fraksi-fraksi di DPR dan berjumlah 496 DIM, yang terdiri dari DIM Tetap sebanyak 450 DIM dan DIM Perubahan yang akan dibahas Panja sebanyak 46 DIM.
- Setelah melalui proses perdebatan dan diskusi yang dinamis dalam Rapat Panja bersama-sama dengan Pemerintah, Panja telah menghasilkan beberapa perubahan, yaitu :
  - 1) Judul RUU, yang semula RUU tentang Merek menjadi RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - 2) Penambahan Jumlah Pasal, yang semula 103 pasal menjadi 109 pasal;
  - 3) Penambahan jumlah Bab, yang semula 19 Bab menjadi 20 Bab.
- Pada tanggal 19 Oktober telah dilakukan Raker dengan Kemenkumham dan dilakukan penandatanganan terkait dengan pengambilan Keputusan atas RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut.

- Pansus RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengajukan penjadwalan Pengambilan Keputusan dalam Pembahasan Tk. II pada Paripurna tgl 27 Oktober 2016.
  - Kendala yang dialami Pansus adalah kesulitan dalam memenuhi kourum/kehadiran Anggota Panja dikarenakan kesibukan dari masing-masing anggota, selain itu adanya koreksi kecil yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR (BKD) yang dilakukan setelah pembahasan RUU selesai dilaksanakan menghambat penyampaian draft RUU tersebut ke Sekretariat Negara (Setneg).
  - Pansus tentang Merek dan Indikasi Geografis mengusulkan agar pelaksanaan tugas dari Badan Keahlian DPR (BKD) dapat disinkronkan dengan pelaksanaan tugas dari Pansus/Komisi, hal ini untuk efisiensi kerja dan juga percepatan pengajuan draft kepada Pemerintah/Presiden.
13. Pimpinan Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyampaikan laporannya sebagai berikut :
- RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU Usul Inisiatif Anggota DPR, dengan demikian DIM berasal dari Pemerintah.
  - Pemerintah telah menyampaikan 146 DIM, yang terdiri atas DIM Tetap sebanyak 38 DIM, dan Perubahan seperti diubah, dihapus, usulan baru yang perlu dibahas Panja sebanyak 108 DIM.
  - Kendala/hambatan selama pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah pemenuhan kourum kehadiran Anggota dan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dan Pansus mengenai judul RUU.
14. Pimpinan Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyampaikan laporannya sebagai berikut :
- Strategisnya RUU ini yang berkaitan dengan aksi terorisme dapat mengganggu berbagai bidang kehidupan yang bertujuan untuk mengganggu keamanan Negara.
  - Diharapkan RUU ini dapat memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan deteksi dini dan akan berarah kepada pencegahan, oleh karena itu dalam pembahasan RUU dituntut adanya integrasi dan koordinasi dari seluruh *stake holder* terkait.
  - Ketelitian dan kehati-hatian dalam memberikan rumusan yang benar akan definisi teroris dan terorisme dalam RUU ini bertujuan agar tidak akan menyinggung SARA tertentu dan tidak akan menimbulkan protes dari masyarakat.
  - Mengharapkan agar masa kerja Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diperpanjang dan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
15. Pimpinan Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara menyampaikan laporannya sebagai berikut :
- Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara masih belum dapat melakukan pembahasan secara maksimal, hal ini dikarenakan Anggota Pansus banyak yang berasal dari Anggota Komisi I yang saat ini juga sibuk dalam pembahasan RUU lain.
  - Meminta agar masa kerja Pansus dapat diperpanjang dan RUU tentang Wawasan Nusantara dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
- B. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Mengusulkan agar Komisi VIII dapat mengajukan RUU tentang Madrasah dan Pesantren untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
2. Mengharapkan kepada Pimpinan Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut mengingat pentingnya keberadaan RUU dalam memberikan perlindungan kepada keamanan Negara.
3. Mengingatkan kepada Pimpinan Komisi VII untuk dapat segera menyelesaikan penyusunan terhadap RUU tentang Migas dan RUU tentang Minerba yang diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, karena kedua RUU tersebut telah cukup lama dalam proses penyusunannya.
4. Meminta kepada Pimpinan Badan Legislasi untuk menindaklanjuti hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang pertembakauan yang saat ini masih belum dijadwalkan oleh Pimpinan DPR untuk disetujui dalam Rapat Paripurna sebagai RUU Usul DPR.
5. Kiranya dapat dilakukan satu aksi untuk mengingatkan Pimpinan DPR bahwa tidak ada mekanisme dan kewenangan Pimpinan DPR untuk menahan permintaan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI atas suatu RUU yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
6. Mekanisme penolakan terhadap suatu RUU untuk menjadi RUU Usul DPR dapat dilakukan pada saat Rapat Paripurna.
7. Kiranya perlu dilakukan penegasan terhadap implementasi peraturan Tata Tertib DPR dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini untuk mengingatkan bahwa tidak ada mekanisme Badan Keahlian DPR (BKD) untuk melakukan kajian terhadap RUU yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan DPR RI di bidang legislasi.

### III. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima Laporan perkembangan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Komisi dan Pansus;
2. Seluruh usulan RUU yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001